

PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH
MISI : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																								
NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah kebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karmah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarakat					Capaian Indeks Kepuasan				Nilai	2,50	2,80		3,00		3,20		3,40		3,60		3,60		Kepala Biro Hukum
		Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Setrategi Daerah: Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Arah Kebijakan Daerah: Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan		Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		
						Capian Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		
		Sasaran RPJMD: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Setrategi RPJMD: Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Arah Kebijakan RPJMD: Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		
	Tujuan Renstra: Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat	Sasaran Renstra: Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	Setrategi Renstra: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik", adalah : Membangun aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel																					
						Program Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Nilai IKM (Satuan: skala)	Indeks	2,8	3,1		3,2		0		0		0		3,5		Kabag Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum	
								Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%				100		100		100		100		100			
								Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%				100		100		100		100		100			
								Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100		100		100		100		100			
								Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100		100		100		100		100			
						Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum	Tersusunnya Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan, dan Pelayanan Perkantoran Pada Tata Usaha Biro Hukum	Jumlah Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum																Kasubag Tata Usaha
						Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Keg	0	0		6		1		1		1		1			
						Sub Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Keg	0	0		8		1		1		1		1			
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Keg	0	0		100		1		1		1		1			
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tertaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur tepat waktu	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Keg	0	0		100		1		1		1		1			

					Sub Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan yang komplen	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Keg	0	100	100	1	1	1	1		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang optimal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Keg	0	100	100	1	1	1	1		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Strategi RPJMD: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	Arah Kebijakan RPJMD: Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan layanan bantuan hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpubikasi			Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpubikasi (%)	%	0	0	100	100	100	100	100		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Strategi Resnra: Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	Arah Kebijakan Resnra: Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah			Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Daerah	Presentase realisasi target propempera (Satuan: %)	%	0	0	100	100	100	100	100		Kabag Peraturan Perundang-undangan
							Persentase Raperda yang memiliki naskah akademik	%	0	0	100	0	0	0	0		
							Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah Kab/Kota dengan regulasi hukum nasional	%	0	0	100	0	0	0	0		
							Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	%	0	0	100	100	100	100	100		
							presentasi pelayanan bantuan hukum dan Ham (Satuan: %)	%	0	0	100	100	100	100	100		Kabag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
							Presentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	%	0	0	100	100	100	100	100		Kabag Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum
					Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah										Kasubag Rancangan Peraturan Daerah
					Sub Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah	Raperda		0	4	4	4	4	4		
					Sub Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Dok		1	1	0	0	0	0		
					Sub Kegiatan Penyusunan RAPERDA Usul Gubernur			%		100	100	0	0	0	0		
					Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Raperda			Dok		6	6	0	0	0	0		
					Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	Tersusunnya Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten										Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
					Sub Kegiatan Legal Drafting Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD/unit kerja	Tersusunnya Legal Drafting Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD/unit kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pergub Non APBD Usulan SKPD/unit kerja	Kegiatan		15	6	6	6	6	6		
					Sub Kegiatan Penyusunan Legal Drafting Keputusan Gubernur	Tersusunnya Legal Drafting Keputusan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur	Kegiatan		15	5	5	5	5	5		
					Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota										Kasubag Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
					Sub Kegiatan Evaluasi Raperda Kab/Kota	Tersusunnya Evaluasi Raperda Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda Kab/Kota	Raperda		3	4	4	4	4	4		

				Sub Kegiatan Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten	Terselenggaranya Kegiatan Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten yang terintegrasi	Jumlah Kegiatan Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
				Sub Kegiatan Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (HPPRI) dan Buku Literatur Hukum			%	100	100	0	0	0	0
				Sub Kegiatan Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten			- %	100	100	0	0	0	0
				Sub Kegiatan Pengeblaan Website JDIH Online Provinsi Banten			%	100	100	0	0	0	0
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/Kota			%	100	100	0	0	0	0